



RENCANA KERJA

2026

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PURI**

Jl. Jend. Sudirman No. 107 Mojokerto 61363

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Renja Kecamatan Puri dilakukan sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebijakan strategis daerah yang mengalami perkembangan setelah dokumen Renja disusun. Proses ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan nasional dan daerah, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Puri pada Tahun 2026 agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis hingga penyusunan akhir. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.



NALURITA PRISWANDINI, S.STP,M Med.Kom
Pembina Tk. I
NIP 19810402 199912 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 3

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU..... 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 18

2.3 Isu – Isu Penting 20

2.3.1 Kondisi Internal..... 20

2.3.2 Kondisi Eksternal 20

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH29

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional29

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.....29

3.3 Progam dan Kegiatan29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN
2026 36

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2026..... 36

4.2 Tagging Tematik 46

BAB V PENUTUP 53

5.1 Catatan Penting 53

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 54

5.3 Rencana Tindak Lanjut 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahunan yang berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Dokumen RKPD, merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD juga merupakan acuan dalam menyempurnakan RENJA Perangkat Daerah. Hal tersebut diatas didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto . Penyusunan RENJA sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai proyeksi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan RENSTRA 2025-2029 Perangkat

Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Mojokerto di Kecamatan Puri dalam rangka mencapai **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”** . Visi Kabupaten Mojokerto inilah yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD sendiri adalah dokumen perencanaan daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Dengan mengacu RPJMD maka langkah selanjutnya adalah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah. RENSTRA Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA SKPD ini berisi tentang visi-misi, tujuan, strategi dan kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif. Dari dokumen RENSTRA selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan RENJA Perangkat Daerah merujuk pada dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi RENJA tahun sebelumnya. Kecamatan Puri masuk kedalam Misi 1 Kabupaten Mojokerto yaitu **“Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”** . Untuk penyelarasan dari Misi 1 Bupati Mojokerto dengan Tujuan Kecamatan Puri maka Kecamatan Puri menetapkan **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** sebagai tujuan Kecamatan Puri.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Puri merupakan Dokumen Perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

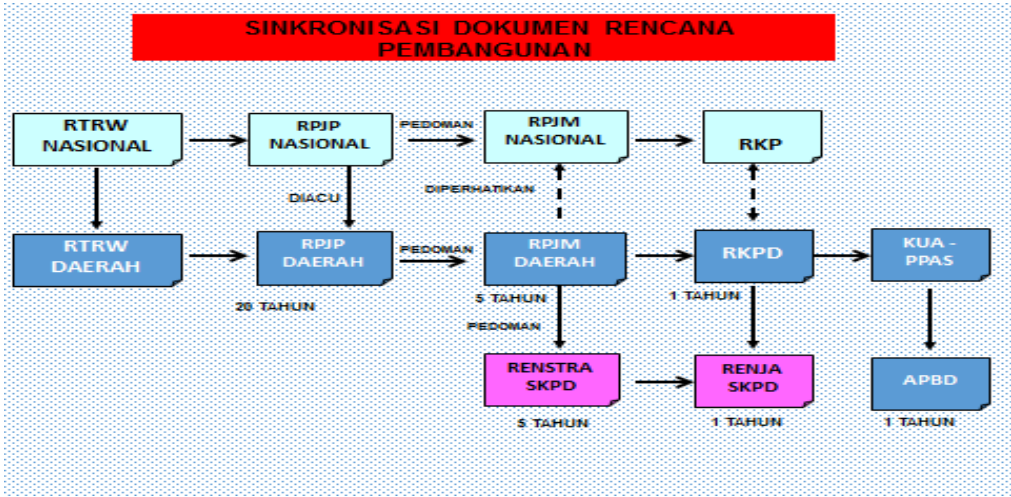
Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Puri yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Puri adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Puri Tahun 2025 – 2029.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan

pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Puri yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Puri.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
25. Peraturan Daerah Kabapupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
26. Paraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
31. Surat Keputusan Camat Puri Nomor : 188/52/416-311/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 pada Kecamatan Puri.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana

pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Puri sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Puri ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Puri pada tahun 2024 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. (Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Realisasi belanja pada Kecamatan Puri Tahun 2024

NO	OPD/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	25.181.100,00	23.487.600,00	93,27%	1.693.500,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.181.100,00	23.487.600,00	93,27%	1.693.500,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	25.181.100,00	23.487.600,00	93,27%	1.693.500,00
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	253.036.900,00	249.885.250,00	98,75%	3.151.650,00

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	253.036.900,00	249.885.250,00	98,75%	3.151.650,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	53.296.200,00	52.608.500,00	98,71%	687.700,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.761.400,00	24.708.400,00	99,79%	53.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	61.386.000,00	60.995.350,00	99,36%	390.650,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	113.593.300,00	111.573.000,00	98,22%	2.020.300,00
III	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.563.363.300,00	2.447.500.955,00	95,48%	115.862.345,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000,00	10.627.000,00	96,60%	373.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.765.000,00	96,08%	235.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.862.000,00	97,24%	138.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.248.923.000,00	2.146.672.724,00	95,45%	102.250.276,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.245.923.000,00	2.143.877.638,00	95,46%	102.045.362,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000,00	2.795.086,00	93,17%	204.914,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.350.000,00	99.886.200,00	97,59%	2.463.800,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.859.400,00	98,59%	140.600,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.500.000,00	27.878.000,00	97,82%	622.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.498.800,00	99,99%	1.200,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.200.000,00	3.000.000,00	93,75%	200.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	28.500.000,00	95,00%	1.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.150.000,00	18.150.000,00	100,00%	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.340.300,00	126.045.681,00	93,13%	9.294.619,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.340.300,00	53.945.729,00	97,48%	1.394.571,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000,00	72.099.952,00	90,12%	7.900.048,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.750.000,00	64.269.350,00	97,74%	1.480.650,00

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.750.000,00	48.530.000,00	99,55%	220.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.100.000,00	82,00%	900.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	11.639.350,00	96,99%	360.650,00
	JUMLAH	2.841.581.300,00	2.720.873.805,00	95,75%	120.707.495,00

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,5	84,23	85	84,95	99,9%	85		
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	100%	7 Inovasi		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	NA	100%	100%	100%	100%	NA		

		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	100%	NA	NA	NA	NA	100%		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	7 dokumen		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dapat tersusun	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100%	11 laporan		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran PD	96%	93,32%	93,35%	95,75	102%	96%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	18 orang/bulan	19 orang/bulan	18 orang/bulan	18 orang/bulan	100%	17 orang/bulan		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	95%	100%	100%	100%	100%	95%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	1 paket	1 paket	5 paket	5 paket	100%	1 paket		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95%	100%	100%	100%	100%	95%		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	NA	6.115 pelayanan	1.100 pelayanan	7.147 pelayanan	100%	NA		
		Persentase Aduan Masyarakat yang telah	100%	NA	NA	NA	NA	100%		

		Ditindaklanjuti								
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 aporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	NA	23 Fasilitasi	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	100%	NA		
		Jumlah laporan koordinasi	26 laporan	NA	NA	NA	NA	26 laporan		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)	8 dokumen	NA	NA	NA	NA	8 dokumen		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 dokumen	NA	NA	NA	NA	4 dokumen		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)	4 dokumen	NA	NA	NA	NA	4 dokumen		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)	12 dokumen	NA	NA	NA	NA	12 dokumen		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 1 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Puri
Tahun 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

**Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Puri
Kabupaten Mojokerto**

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai IKM			90	93,6	93,77	93,8	93,57	93,7	93,77	93,8	
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			84	85	85	85,5	84,87	84,87	85	85,5	
	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah			82%	83%	96%	96,5%	93,32%	95,75%	96%	96,5%	
	IP ASN Perangkat Daerah			61	62	81	82	88,85	88,85	81	82	
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	

2.3. Isu – Isu Penting

Kecamatan Puri sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis, karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Puri diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

2.3.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Puri.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Puri;
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi;
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan;
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai;
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang mencukupi;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami teknologi informasi

2.3.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Puri dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi wilayah Kecamatan Puri yang subur sehingga merupakan daerah yang prospektif untuk penyelenggaraan kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kegiatan lainnya;
2. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata;
3. Tingginya peluang pasar;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
5. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan;
2. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
4. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang;
5. Kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengetahuan di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan Masyarakat maka perlu diadakan kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan masyarakat seperti Kegiatan Penurunan Stunting , Forum Anak , Karang Taruna , PKK dll.
6. Banyak format pelayanan yang berbeda tiap kecamatan;
7. Kurangnya pemahaman Kepala Desa beserta perangkat desa tentang teknis dan pentingnya Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa;
9. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa antar kecamatan;

10. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 .Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

NO.	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Puri	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	85,50	2.523.626.119,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Puri	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	85,50	2.525.638.919,00	
			Persentase Realisasi Anggaran PD	95%				Persentase Realisasi Anggaran PD	95%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%	3.200.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%	3.200.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.600.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.600.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 laporan	1.600.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 laporan	1.600.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	2.281.267.159,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	2.307.721.000,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.281.267.159,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.307.721.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	92%	82.700.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	92%	57.317.919,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Puri	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Puri	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.700.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.700.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Puri	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	20.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Puri	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	20.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puri	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.500.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.117.919,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puri	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	92%	106.708.960,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puri	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	92%	106.108.960,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	47.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	46.900.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.208.960,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.208.960,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puri	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	85%	49.750.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puri	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	85%	51.291.040,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Puri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	31.250.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Puri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	31.250.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Puri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Puri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	16.711.040,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Puri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Puri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	3.330.000,00	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Puri	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	81%	15.500.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Puri	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	81%	15.229.000,00	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Puri	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	15.500.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Puri	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	15.229.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Puri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 laporan	15.500.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Puri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 laporan	15.229.000,00	
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Puri	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	174.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Puri	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	172.258.200,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah laporan koordinasi	23 laporan	174.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah laporan koordinasi	23 laporan	172.258.200,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	8 Dokumen	30.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	8 Dokumen	28.680.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	16.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	15.800.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	31.500.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	31.500.000,00	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	96.500.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	96.278.200,00	
					2.713.126.119,00					2.713.126.119,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Puri melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Puri secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Ekor Hewan Qurban Idul Adha	Hibah Sapi untuk 1 Desa

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Puri ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 1 “ **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2029. Sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah : “**Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan**”.

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2029 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	93,77	93,80	93,90	94.10	94,20
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Puri Tahun 2026 mengacu pada Tujuan Kecamatan Puri yang tertuang pada Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Puri untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

Kode	Rencana Tahun 2026					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	UNSUR KEWILAYAAN								
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	Kec. Puri	85,50	2.525.638.919	APBD		86	3.395.447.000
		Persentase Realisasi Anggaran PD		95%				96%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Kec. Puri	90%	3.200.000	APBD		91%	22.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puri	6 Dokumen	1.600.000	APBD		6 Dokumen	7.000.000

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	11 laporan	1.600.000	APBD		11 laporan	15.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Kec. Puri	100%	2.307.721.000	APBD		100%	2.491.447.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puri	20 Orang/bulan	2.307.721.000	APBD		20 Orang/ Bulan	2.491.447.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kec. Puri	81	0	APBD		82	56.000.000
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Puri	0	0	APBD		0	24.000.000
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Puri	0	0	APBD		0	32.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Kec. Puri	92%	57.317.919	APBD		92%	278.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	1 paket	3.000.000	APBD		1 paket	20.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	0	0	APBD		2 paket	130.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	4 Paket	20.000.000	APBD		4 paket	40.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Puri	2 Paket	3.500.000	APBD		2 paket	12.500.000

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Puri	2 Dokumen	2.700.000	APBD		2 Dokumen	7.500.000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Puri	4 paket	20.000.000	APBD		4 paket	48.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puri	12 Laporan	8.117.919	APBD		12 laporan	20.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Kec. Puri	92%	106.108.960	APBD		92%	397.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Puri	12 laporan	46.900.000,00	APBD		12 laporan	340.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	12 Laporan	59.208.960,00	APBD		12 laporan	57.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Kec. Puri	85%	51.291.040	APBD		86%	151.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Puri	1 Unit	31.250.000,00	APBD		1 unit	71.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Puri	1 Unit	16.711.040,00	APBD		12 unit	80.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Puri	5 Unit	3.330.000,00	APBD		2 unit	175.000.000

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Kec. Puri	81%	15.229.000	APBD		82%	65.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Kec. Puri	100%	15.229.000	APBD		100%	65.000.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Puri	6 laporan	15.229.000,00	APBD		6 laporan	65.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	Kec. Puri	100%	172.258.200	APBD		100%	400.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi	Kec. Puri	23 laporan	172.258.200	APBD		23 laporan	400.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Kec. Puri	8 Dokumen	28.680.000,00	APBD		8 Dokumen	85.000.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Puri	5 Dokumen	15.800.000,00	APBD		5 Dokumen	70.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puri	4 Dokumen	31.500.000,00	APBD		5 Dokumen	110.000.000

7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Puri	6 Dokumen	96.278.200,00	APBD		5 Dokumen	135.000.000
JUMLAH					2.713.126.119				3.860.447.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami dan tidak mengalami . Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi

gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tahun 2026, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026

KODE SKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0000

NAMA SKPD : KECAMATAN PURI

No.	Kode	PROGRAM KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV.		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD terkait	Pagu (Rp)	KL	(Rp)	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		L		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Keseekretarian	85,50	Kec. Puri	2.525.638.919	-	0	-	0	-
						Persentase Realisasi Anggaran PD	95%							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		L	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%		90%	Kec. Puri	3.200.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		L	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	Kec. Puri	1.600.000	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Rancangan Awal Renja</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>Rancangan Renja</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>Rancangan Akhir Renja</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>Renja (sampai RKA - DPA)</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>Rancangan Perubahan Renja</i>					<i>1 dokumen</i>							

		<i>P-Renja (sampai P-RKA - DPPA)</i>					<i>1 dokumen</i>							
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		L	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 laporan	Kec. Puri	1.600.000	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Penyusunan dokumen evaluasi kinerja triwulan</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Laporan LKJIP</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Laporan Pendukung LKPJ Bupati</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Penyusunan Laporan LRA</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Penyusunan Dokumen CALK</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Penyusunan Dokumen SAKIP</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Penyusunan dokumen RB</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Perjanjian Kinerja</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Perubahan Perjanjian Kinerja</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Penyusunan Laporan Kinerja</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Laporan rekonsiliasi Belanja</i>												
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		L	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti		100%	Kec. Puri	2.307.721.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 Orang/bulan	Kec. Puri	2.307.721.000	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Gaji</i>					<i>20 orang/Bulan</i>							
		<i>TPP</i>					<i>20 orang/Bulan</i>							
		<i>Pengelola Keuangan</i>					<i>4 orang/Bulan</i>							

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			IP ASN Perangkat Daerah		81	Kec. Puri	0	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	Kec. Puri	0	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0	Kec. Puri	0	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		L	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar		92%	Kec. Puri	57.317.919	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		L	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	Kec. Puri	3.000.000	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Lampu , Kabel , Komponen Listrik Lainnya</i>					<i>1 paket</i>							
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	Kec. Puri	0	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	Kec. Puri	20.000.000	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Makanan dan Minuman Rapat</i>					<i>4 paket</i>							
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		2 Paket	Kec. Puri	3.500.000	-	0	-	0	-

					yang Disediakan									
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Cetak Map Dinas</i>					<i>2 paket</i>							
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		L	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	Kec. Puri	2.700.000	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Koran</i>					<i>2 dokumen</i>							
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		L	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4 paket	Kec. Puri	20.000.000	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>ATK dan Bahan Komputer (tinta)</i>					<i>4 paket</i>							
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Kec. Puri	8.117.919	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>SPPD</i>					<i>12 laporan</i>							
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar		92%	Kec. Puri	106.108.960	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	Kec. Puri	46.900.000,00	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Belanja Tagihan Air dan Listrik</i>					<i>12 laporan</i>							

	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Kec. Puri	59.208.960,00	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional (5 orang)</i>					<i>12 laporan</i>							
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar		85%	Kec. Puri	51.291.040	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	Kec. Puri	31.250.000,00	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>BBM</i>					<i>1 unit</i>							
		<i>Pajak</i>					<i>1 unit</i>							
		<i>Pemeliharaan</i>					<i>1 unit</i>							
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Kec. Puri	16.711.040,00	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Tenaga Kebersihan</i>					<i>1 Orang</i>							
		<i>Pemeliharaan Gedung</i>					<i>1 Unit</i>							

	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		L	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	Kec. Puri	3.330.000,00	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll</i>					<i>5 unit</i>							
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		L	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar		81%	Kec. Puri	15.229.000	-	0	-	0	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		L	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti		100%	Kec. Puri	15.229.000	-	0	-	0	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		L	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		6 laporan	Kec. Puri	15.229.000,00	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Laporan E-Sukma</i>					<i>1 laporan</i>							
		<i>Laporan PATEN Triwulan</i>					<i>4 laporan</i>							
		<i>Laporan FKP</i>					<i>1 laporan</i>							
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		L	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti		100%	Kec. Puri	172.258.200	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Jumlah laporan koordinasi		23 laporan	Kec. Puri	172.258.200	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		L	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka		8 Dokumen	Kec. Puri	28.680.000,00	-	0	-	0	-

					Administrasi Pemerintahan Desa									
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Evaluasi Raperdes APB Des</i>					1 dokumen							
		<i>Evaluai Raperdes P-APBDes</i>					1 dokumen							
		<i>Evaluasi Raperdes LPJ-APBDES</i>					1 dokumen							
		<i>Klarifikasi Perdes RKP Desa</i>					1 dokumen							
		<i>Monev Semanis Puri</i>					1 dokumen							
		<i>Monev Realisasi Semester I</i>					1 dokumen							
		<i>Laporan Konferensi Desa</i>					1 dokumen							
		<i>Laporan Kematian Pemakaman</i>					1 dokumen							
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		L	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 Dokumen	Kec. Puri	15.800.000,00	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Laporan Pelaksanaan Musrenbang Tematik</i>					1 dokumen							
		<i>Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</i>					1 dokumen							
		<i>Laporan Monev BK Desa, KDMP, Bumdema</i>					1 dokumen							
		<i>Laporan Usulan Desa di SIPD</i>					1 dokumen							
		<i>Laporan LPJ BK Desa ke Bupati</i>					1 dokumen							
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan		4 Dokumen	Kec. Puri	31.500.000,00	-	0	-	0	-

					Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Honorarium Tim Forkopimca</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>Pemantauan wilayah</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>Upacara dan Tasyakuran HUT RI</i>					<i>1 dokumen</i>							
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		6 Dokumen	Kec. Puri	96.278.200,00	-	0	-	0	-
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Pleno PKK 6 kali</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>Lomba PKK</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>Pelatihan PKK</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>Hibah Sapi Qurban</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>DOA bersama</i>					<i>1 dokumen</i>							
		<i>Lomba MTQ Kabupaten</i>					<i>1 dokumen</i>							
JUMLAH									2.713.126.119					

4.2 Tagging Tematik

Berikutnya dilakukan tagging kegiatan tematik sebagai salah satu mekanisme strategis untuk menandai kontribusi nyata perangkat daerah terhadap agenda pembangunan yang bersifat lintas bidang, mendesak, dan berdampak langsung pada masyarakat. Tagging kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknokratis dalam penelusuran belanja publik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin bahwa sumber daya fiskal digunakan secara tepat sasaran dan mendukung prioritas bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dengan memanfaatkan pendekatan tagging, Kecamatan ikut serta mendorong keterpaduan antara logika intervensi kelembagaan dengan arah kebijakan nasional seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, pengendalian inflasi, dan percepatan transformasi digital pemerintahan. Di tingkat daerah, mekanisme ini juga menjadi sarana untuk memetakan kontribusi nyata perangkat daerah dalam menjawab isu strategis lokal sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen RPJMD 2025-2029.

Adapun daftar tagging sub kegiatan dilingkup Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dalam Rencana Kerja Tahun 2026 yang mendukung program/kegiatan tematik tersebut tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Tagging Sub kegiatan yang Mendukung Program/Kegiatan Tematik
Tahun 2026

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN RKPD 2026										
			KABUPATEN LAYAK ANAK	KABUPATEN SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANH AM	GENDER	KUM UH	INFRASTRUKTUR	VISI MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN PURI		0	0	15.229.000	0	0	0	0	2.713.126.119			2.713.126.119
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Keseekretariatan								2.525.638.919			2.525.638.919
		Persentase Realisasi Anggaran PD											
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%								3.200.000			3.200.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								1.600.000			1.600.000

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.600.000			1.600.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti								2.307.721.000			2.307.721.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								2.307.721.000			2.307.721.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah								0			0
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								0			0
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								0			0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar								57.317.919			57.317.919

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan								3.000.000			3.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								0			0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								20.000.000			20.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								3.500.000			3.500.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan								2.700.000			2.700.000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan								20.000.000			20.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								8.117.919			8.117.919

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar								106.108.960			106.108.960
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								46.900.000			46.900.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								59.208.960			59.208.960
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar								51.291.040			51.291.040
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								31.250.000			31.250.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								16.711.040			16.711.040

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								3.330.000			3.330.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar			15.229.000					15.229.000			15.229.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti			15.229.000					15.229.000			15.229.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			15.229.000					15.229.000			15.229.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti								172.258.200			172.258.200
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi								172.258.200			172.258.200

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa								28.680.000			28.680.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								15.800.000			15.800.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								31.500.000			31.500.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								96.278.200			96.278.200
JUMLAH			0	0	15.229.000	0	0	0	0	2.713.126.119	0	0	2.713.126.119

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puri Tahun 2026 ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, baik dari sisi kebijakan, capaian program, maupun kebutuhan masyarakat yang muncul sepanjang tahun berjalan. Renja ini merupakan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, serta tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Renja Kecamatan Puri Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Puri dapat berjalan lebih adaptif, terarah, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, serta sebagai instrumen evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Puri.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja Kecamatan Puri Tahun 2026

- a. Renja Kecamatan harus selaras dan konsisten dengan dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja semester sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangan;
- c. Aspirasi masyarakat dan hasil Musrenbang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif;
- d. kegiatan/program harus mempertimbangkan kemampuan riil anggaran, termasuk kebijakan refocusing atau penghematan belanja;
- e. Penyusunan Renja harus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama OPD teknis dan Bappeda, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas sektor atau dukungan teknis dari dinas lain;
- f. Proses penyusunan Renja wajib mengikuti jadwal dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh Bappeda sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Renja harus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.

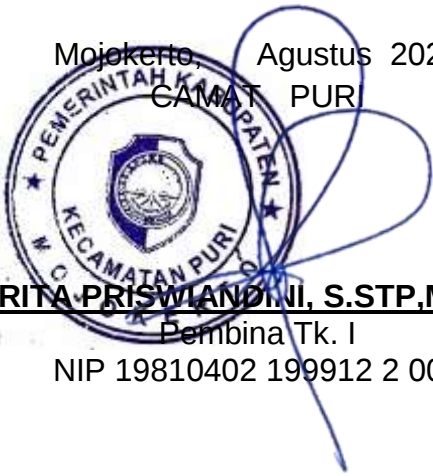
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dalam Penyusunan Renja Kecamatan Puri Tahun 2026

- a. Penyusunan Renja Kecamatan harus mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Renja harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Penyusunan harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan aktual;
- d. Proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan pemangku kepentingan utama;
- e. Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala;
- f. Penyusunan harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran.

4.3. Rencana Tindak Lanjut dalam Penyusunan Renja Kecamatan Puri Tahun 2026

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan OPD yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan Kecamatan;
- b. Memastikan kesesuaian antara usulan Kecamatan dengan program prioritas OPD teknis;
- c. Menyelaraskan hasil Renja Kecamatan dengan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
- d. Menyampaikan hasil Renja kepada seluruh unit kerja dan perangkat kecamatan;
- e. Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sesuai hasil untuk semester selanjutnya;
- f. Menyusun rencana pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Renja.

Akhirnya, penyusunan dokumen Renja Kecamatan Puri Tahun 2026 ini merupakan wujud komitmen Kecamatan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan secara berkelanjutan.

Mojokerto, Agustus 2025
CAMAT PURI

NALURITA PRISWLANDI, S.STP,M Med.Kom
Pembina Tk. I
NIP 19810402 199912 2 001